

EVALUASI TEMPAT PEMBERHENTIAN ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN (Studi Kasus di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

AKSAN REYFALI

Taruna Program Studi Diploma III
Manajemen Transportasi Jalan
Politeknik Transportasi Darat
Indonesia-STTD
Jalan Raya Setu Km.3,5, Cibitung,
Bekasi Jawa Barat 17520

TATANG ADHIATNA

Dosen Program Studi Diploma III
Manajemen Transportasi Jalan
Politeknik Transportasi Darat
Indonesia-STTD
Jalan Raya Setu Km.3,5, Cibitung,
Bekasi Jawa Barat 17520

NOMIN

Dosen Program Studi Diploma III
Manajemen Transportasi Jalan
Politeknik Transportasi Darat
Indonesia-STTD
Jalan Raya Setu Km.3,5, Cibitung,
Bekasi Jawa Barat 17520

ABSTRACT

Public transportation infrastructure is also needed to serve people who travel daily using public transportation. Among the infrastructure needed is a bus stop. Bus stops play an important role in helping smooth traffic and directing public transportation in raising and lowering passengers. The function of the bus stop for public transportation passengers is to make it easier for public transportation users to change modes of transportation, the stop is also a convenient place to wait for public transportation and as a place to raise and drop off passengers. In determining the need for a place to stop, there are several conditions, including being on the trajectory of public transportation routes and based on the report of the Transportation Safety Section for Facilities and Infrastructure Safety, South River Upper Dishub in 2022 there are 4 routes permitted, but for now there is only 1 route that is still active.

Due to the large number of people who prefer to use private vehicles rather than public transportation, making public transportation difficult to get passengers. There are two types of data collected in this study, namely primary data and secondary data. Primary data is data taken directly through field surveys, while secondary data is data obtained from relevant government agencies or agencies. The data obtained by Rural Transport Route Network Data Stop Data in South Hulu Sungai Regency. The method of data collection is by means of bus stop inventory surveys, dynamic surveys conducted in the upper reaches of South River.

Keywords : *Public Transportation, Bus Stops, Public Transport Infrastructure, dynamic survey*

ABSTRAK

Prasarana angkutan umum pun diperlukan untuk melayani masyarakat yang sehari-harinya bepergian dengan menggunakan angkutan umum. Diantara prasarana yang dibutuhkan tersebut adalah halte. Halte berperan penting dalam membantu kelancaran lalu lintas dan mengarahkan kendaraan umum dalam menaiki dan menurunkan penumpang. Fungsi halte bagi penumpang angkutan umum adalah untuk memudahkan para pengguna angkutan umum berganti moda transportasi, halte juga merupakan tempat yang nyaman untuk menunggu angkutan umum dan sebagai tempat menaiki dan menurunkan penumpang. Dalam menentukan kebutuhan tempat pemberhentian terdapat beberapa syarat diantaranya yaitu berada dalam lintasan trayek angkutan umum dan berdasarkan laporan Seksi Keselamatan Transportasi Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, Dishub Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 terdapat 4 trayek yang diizinkan, akan tetapi untuk saat ini yang beroperasi hanya ada 1 trayek yang masih aktif.

Dikarenakan banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum, menjadikan angkutan umum sulit mendapatkan penumpang. Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung melalui survei lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga pemerintah terkait. Adapun data yang di dapat Data Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan Data Halte di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Metode pengumpulan data dengan cara survei inventarisasi halte, survei dinamis yang dilakukan di kabupaten hulu Sungai Selatan.

Kata Kunci : Angkutan Umum, Halte, Prasarana Angkutan Umum, survei dinamis

PENDAHULUAN

Prasarana angkutan umum pun diperlukan untuk melayani masyarakat yang sehari-harinya bepergian dengan menggunakan angkutan umum. Diantara prasarana yang dibutuhkan tersebut adalah halte. Halte berperan penting dalam membantu kelancaran lalu lintas dan mengarahkan kendaraan umum dalam menaiki dan menurunkan penumpang. Fungsi halte bagi penumpang angkutan umum adalah untuk memudahkan para pengguna angkutan umum berganti moda transportasi, halte juga merupakan tempat yang nyaman untuk menunggu angkutan umum dan sebagai tempat menaiki dan menurunkan penumpang.

Adapun permasalahan yang terjadi yaitu :

- 1 Kinerja tempat pemberhentian angkutan pedesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang optimal 7 rusak dan 9 tidak terpakai.
- 2 Perlu pengoptimalan halte pada saat ini dengan memperbaiki yang rusak dan menentukan titik lokasi halte yang dibutuhkan untuk dibangun.
- 3 Perlu desain yang memadai untuk fasilitas halte di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar bisa digunakan penumpang dengan nyaman

METODE

Metode Pengumpulan Data

Setelah memperoleh data pada tahap sebelumnya maka dilakukan analisis data dan pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dari wilayah studi. Adapun analisis pada penelitian ini yaitu meliputi kinerja tempat pemberhentian angkutan pedesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini, Permasalahan pada tempat pemberhentian angkutan pedesaan saat ini, serta usulan dan desain pengoptimalan halte di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Metode Analisis Data

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 diatur bahwa fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau Gedung parkir. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin dan dapat dipungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. Sedangkan untuk fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Inventarisasi

berikut merupakan hasil analisis dari inventarisasi ruas jalan lintas melawi kabupaten sintang :

Table 1 Survey Dinamis Trayek Kandangan - Loksado

TRAYEK	SEGMENT BERANGKAT	PNP NAIK	PNP TURUN	JUMLAH PNP
Kandangan – Loksado	Terminal Loksado – SD N Tanuhi	1	0	1
	SD N Tanuhi – Poskesdes Lumpangi	0	0	0
	Poskesdes Lumpangi – Bundaran Loksado	0	1	1
	Bundaran Loksado – Balai Desa Mawangi	1	0	1

	Balai Desa Mawangi – Pasar Padang Batung	0	1	1
	Pasar Padang Batung – Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam	2	0	2
	Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam – Bakso Timbul	2	1	3
	Bakso Timbul – Masjid Taqwa	0	1	1
	Masjid Taqwa – Terminal Kota Kandangan	0	2	2

Table 2 Survey Dinamis Trayek Kandangan - Loksado

TRAYEK	SEGMENT PULANG	PNP NAIK	PNP TURUN	JUMLAH PNP
Kandangan – Loksado	Terminal Kota Kandangan – Masjid Tawia	3	0	3
	Masjid Tawia – Bakso Timbul	0	0	0
	Bakso Timbul – Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam	0	0	0
	Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam – Pasar Padang Batung	1	0	1
	Pasar Padang Batung – Balai Desa Mawangi	0	1	1
	Balai Desa Mawangi – Bundaran Loksado	0	1	1
	Bundaran Loksado – Poskesdes Lumpangi	1	1	2
	Poskesdes Lumpangi – SD N Tanuhi	0	1	1
SD N Tanuhi – Terminal Loksado	0	1	1	

Pada tabel 1 dapat diketahui Data tersebut diperoleh dari survey dinamis angkutan pedesaan trayek Kandangan – Loksado. Survey dinamis (titik kantong penumpang) angkutan pedesaan ini dilakukan pada saat jam sibuk agar mendapatkan jumlah penumpang yang ideal baik naik maupun turun. Sehingga diperoleh data jumlah naik turun penumpang pada tiap segmen.

ANALISIS VOLUME LALU LINTAS

Tabel 3 Analisis Distribusi Frekuensi

NO	INTERVAL KELAS	FREKUENSI	FREKUENSI KOMULATIF	PERSENTASE	PERSENTASE KOMULATIF
1	0-1	13	13	72%	72%
2	2-3	5	18	27%	99%

Keterangan :

Interval kelas = Diperoleh dari penentuan jumlah interval

Frekuensi = Jumlah data antara interval kelas

Frekuensi Kumulatif = Penjumlahan frekuensi sebelum dan sesudah kelas interval

Persentase = Frekuensi di bagi jumlah data di kali 100%

Persentase Kumulatif = Penjumlahan persentase sebelum dan sesudah kelas interval

Dari table 2 dapat diketahui posisi data persentil 85%. Diketahui distribusi frekuensi dari tiap – tiap kelas intervalnya. Data distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui posisi data persentil 85%. Dari tabel diatas diketahui distribusi frekuensi pada kelas interval dan persentil 85% berada pada interval kelas 0 - 1 dengan frekuensi 13 dan frekuensi kumulatif sebesar 13.

Tabel 4 Penentuan Kebutuhan Halte

	SEGMENT	JUMLAH PNP	KEBUTUHAN
Kandangan – Loksado	Terminal Loksado–SD N Tanuhi	1	Tidak Butuh
	SD N Tanuhi – Poskesdes Lumpangi	0	Tidak Butuh
	Poskesdes Lumpangi – Bundaran Loksado	1	Tidak Butuh
	Bundaran Loksado – Balai Desa Mawangi	1	Tidak Butuh
	Balai Desa Mawangi – Pasar Padang Batung	1	Tidak Butuh
	Pasar Padang Batung–Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam	2	Butuh
	Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam – Bakso Timbul	3	Butuh
	Bakso Timbul – Masjid Taqwa	1	Tidak Butuh
	Masjid Taqwa – Terminal Kota Kandangan	2	Butuh

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 9 segmen terdapat 6 segmen yang tidak membutuhkan halte karena tidak memenuhi jumlah penumpang minimal yaitu penumpang. Sedangkan untuk 3 segmen lainnya membutuhkan halte karena memenuhi jumlah penumpang minimal lebih dari 2 penumpang.

Tabel 5 Analisis Kebutuhan Halte Berdasarkan Tata Guna Lahan

SEGMENT	TATA GUNA LAHAN	JARAK STANDAR	PANJANG SEGMENT(m)
Pasar Padang Batung – Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam	Perdagangan, Pertokoan, Pemukiman, Perkantoran	300 - 400	3400

Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam – Bakso Timbul	Perkantoran, Pertokoan, Pemukiman	300 - 400	3000
Masjid Taqwa – Terminal Kota Kandangan	Perdagangan, Pertokoan, Perkantoran	300 - 400	300

Berikut contoh perhitungan kebutuhan halte berdasarkan jarak antar halte dan tata guna lahan :

- Segmen Pasar Padang Batung – Langgar Darul Mukarramah Kaliring Dalam
- Karakteristik Lokasi : Kota
- Tata Guna Lahan : Perdagangan, Pertokoan, Pemukiman, Perkantoran
- Standar Tempat Henti : 300-400 meter
- Panjang Segmen : 3400 meter
- Jarak Minimal Dari Simpang : 50 meter
- Farside & Nearside : 50 x 2 = 100 meter

Panjang Segmen – Jarak Minimal Dari Simpang

$$\begin{aligned}
 \text{Kebutuhan Halte Ideal} &= \frac{\text{Panjang Segmen} - \text{Jarak Minimal Dari Simpang}}{\text{Standar Tempat Henti}} \\
 &= (3400-50)/400 \\
 &= 8,375 \\
 &= 8 \text{ Halte}
 \end{aligned}$$

Dari table 4 dapat diketahui bahwa kebutuhan ideal untuk halte Pasar Padang Batung-Langgar Darul Mukarramah adalah 8 halte, angka 8 merupakan angka ideal, hal ini untuk menentukan bahwa nilai tersebut tetap disesuaikan dengan tata guna lahan disepanjang ruas jalan tersebut. Jarak standar yang dibutuhkan untuk perhitungan jumlah ideal halte adalah antara 300-400. Nilai 400 untuk menunjukkan efisensi dari beberapa sudut pandang, yaitu sudut pandang penumpang, sudut pandang operator dan sudut pandang lain

Tabel 6 Analisis Kebutuhan Halte Berdasarkan Jarak dan Tata Guna Lahan

SEGMENT	PANJANG SEGMENT	TATA GUNA LAHAN	JARAK STANDAR	KEBUTUHAN HALTE	HALTE EKSISTING
Pasar Padang Batung – Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam	3400	Perdagangan, Pertokoan, Pemukiman, Perkantoran	300 – 400	8	0
Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam – Bakso Timbul	3000	Perkantoran, Pertokoan, Pemukiman	300 – 400	7	0
Masjid Taqwa – Terminal Kota Kandangan	300	Perdagangan, Pertokoan, Perkantoran	300 – 400	1	1

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui kebutuhan halte pada segmen Pasar Padang Batung sampai Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam yaitu 8 halte, segmen Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam sampai Bakso Timbul yaitu 7 halte dan pada segmen Masjid Taqwa sampai Terminal Kota Kandangan yaitu 1 halte.

Tabel 7 Lokasi Usulan Halte

NO	LOKASI HALTE USULAN	STATUS JALAN	TATA GUNA LAHAN	HALTE EKSISTING	KEBUTUHAN HALTE
1	Jalan Kandangan – Batulicin (depan pasar padang batung)	Jalan	Perdagangan, Pemukiman	0	8

		Nasional			
2	Jalan Kandangan – Batulicin (depan kantor pos padang batung)	Jalan Nasional	Perkantoran, Pemukiman		
3	Jalan Kandangan – Batulicin (samping toko baut Rahim)	Jalan Nasional	Pertokoan, Pemukiman		
4	Jalan Kandangan – Batulicin (depan rumah warga)	Jalan Nasional	Pertokoan, Pemukiman		
5	Jalan Kandangan – Batulicin (samping polsek padang batung)	Jalan Nasional	Perkantoran, Pemukiman		
6	Jalan Kandangan – Batulicin (depan kantor desa jembatan merah)	Jalan Nasional	Perkantoran, Pemukiman		
7	Jalan Kandangan – Batulicin (depan mini toko)	Jalan Nasional	Pertokoan, Pemukiman		
8	Jalan Kandangan – Batulicin (depan rumah makan)	Jalan Nasional	Pertokoan, Pemukiman		

Dari tabel 6 lokasi usulan halte tersebut dibutuhkan 8 halte untuk segmen Pasar Padang Batung – Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam. Titik halte usulan segmen Pasae Padang Batung – Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 8 Lokasi Usulan Halte

NO	LOKASI HALTE USULAN	STATUS JALAN	TATA GUNA LAHAN	HALTE EKSISTIN G	KEBUTUHAN HALTE
1	Jl. Brig Jend. H. Hasan Basry (samping bank bri unit padang batung)	Jalan Nasional	Perkantoran, Pemukiman	0	7
2	Jl. Brig Jend. H. Hasan Basry (depan masjid al baitul makmur)	Jalan Nasional	Pertokoan, Pemukiman		
3	Jl. Brig Jend. H. Hasan Basry (depan rumah warga)	Jalan Nasional	Pertokoan, Pemukiman		
4	Jl. Brig Jend. H. Hasan Basry (samping puskesmas pembantu)	Jalan Nasional	Perkantoran, Pertokoan		
5	l. H. Hasan Basry (depan toko sembako 3 saudara)	Jalan Kabupaten	Pertokoan		
6	l. H. Hasan Basry (depan toko grosir)	Jalan Kabupaten	Pertokoan		
7	l. H. Hasan Basry (depan toko ponsel)	Jalan Kabupaten	Pertokoan		

Pada tabel 7 lokasi usulan halte tersebut dibutuhkan 7 halte untuk segmen Pasar Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam – Bakso Timbul. Titik halte usulan pada segmen Langgar Farul Mukkaramah Kaliring Dalam – Bakso Timbul dapat dilihat pada gambar berikut :

.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan terkait dengan fasilitas dan prasarana tempat pemberhentian angkutan umum pada trayek angkutan pedesaan sebagai berikut :

1. Di wilayah kajian terdapat 4 trayek angkutan pedesaan, akan tetapi untuk saat ini hanya ada 1 trayek angkutan pedesaan yang masih aktif beroperasi yaitu trayek Kandangan - Loksado dan terdapat 12 tempat pemberhentian angkutan pedesaan yang melayani trayek tersebut.
2. Permasalahan tempat pemberhentian angkutan pedesaan di wilayah kajian terdapat 7 tempat pemberhentian rusak, 9 tempat pemberhentian tidak terpakai dan 2 segmen yang membutuhkan tempat pemberhentian angkutan pedesaan yaitu sebanyak 15 tempat pemberhentian, untuk segmen Pasar Padang Batung – Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam 8 tempat pemberhentian dan untuk segmen Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam – Bakso Timbul 7 tempat pemberhentian.
3. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan halte pada segmen Pasar Padang Batung– Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam, segmen Langgar Darul Mukkaramah Kaliring Dalam – Bakso Timbul, segmen Masjid Taqwa – Terminal Kota Kandangan terdapat pembangunan halte yang berjumlah 15 halte pada ruas jalan yang dilalui trayek Kandangan – Loksado. Dan desain halte yang digunakan agar sesuai dengan kondisi yang terdapat pada titik lokasi halte yang telah ditentukan digunakanlah halte dengan posisi pejalan kaki berada di depan. Desain ini yang dirasa paling cocok dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga halte dapat digunakan secara optimal.

SARAN

Berikut merupakan saran yang diberikan terkait dengan pengembangan prasarana tempat pemberhentian yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu :

1. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka sangat diperlukan pengadaan fasilitas tempat pemberhentian angkutan pedesaan yang sesuai dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya, serta masyarakat diharapkan agar dapat memanfaatkan fasilitas halte secara maksimal, agar dapat bertahan lama halte harus diberikan pengawasan dan pemeliharaan.
2. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum fasilitas harus dibuat sesuai dengan pedoman teknis dan penempatan lokasi fasilitas pemberhentian angkutan pedesaan disesuaikan dengan hasil analisis penentuan lokasi. Dengan demikian diharapkan prasarana yang dibangun dapat berfungsi secara optimal.
3. Melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat pengguna angkutan pedesaan agar menggunakan halte sebagai tempat untuk menaik dan menurunkan penumpang angkutan pedesaan.

REFERENSI

- _____, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta
- _____, 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Jakarta.
- _____, 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta.
- _____, 2010, Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan, Jakarta
- _____, 1996, SK. Dirjen Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96, Direktorat Jenderal Perhubungan, Jakarta.
- Harinaldi. 2005, Prinsip – Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains, Jakarta : Erlangga.
- Tamin, O.Z, 1997. Perencanaan dan Permodelan Transportasi, Teknik Sipil, ITB, Bandung.
- Murtono B.A. & Quintarina U., 1991, Teori Perancangan Kota, Fakultas Pascasarjana, ITB, Bandung
- Kelompok PKL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023, Laporan Umum Taruna Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Program D-III Manajemen Transportasi Jalan.